

MI
UNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

SKRIPSI

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG**



Disusun Oleh :

LABET

01003120010

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2005

1/1

5
339. 807
lab
2
C-060001
2005.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA
SKRIPSI**



**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG**



R. 13626 / 13987

Disusun Oleh :

LABET

01003120010

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LABET

NIM : 01003120010

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH

JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN
KOTA PALEMBANG

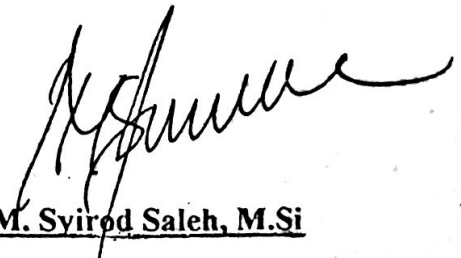
PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL : 21/8 - 2005 KETUA PANITIA :



Drs. M. Umar Nur

TANGGAL : - 2005 ANGGOTA :



Drs. M. Syirod Saleh, M.Si

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

SKRIPSI

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG

DIAJUKAN OLEH

NAMA : LABET

NIM : 01003120010

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
Pada tanggal 18 Oktober 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

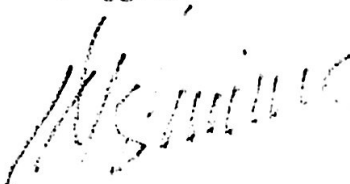
Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



Drs. M. Umar Nuh

Anggota



Drs. M. Syirod Saleh, M.Si

Anggota



Dra. Eka Rostartina

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Suhel, M.Si

Motto :

“ Hidup Itu Adalah Perjuangan dan pantang menyerah karena di dunia ini tak ada yang abadi, scandainya harus memilih pilihlah yang terbaik buat hidupmu karena kesuksesan adalah buah dari kerja keras ” (Labet)

**Karya ini
Kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Keluarga besarku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka membiayai perekonomian daerah terlebih lagi di era otonomi daerah ini.

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini nantinya yang akan di kelola untuk membiayai perekonomian dan pembangunan khususnya Kota Palembang. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul “Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perkembangan Perekonomian Kota Palembang”. Penulis mencoba melihat serta menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kota Palembang sebagai indikator perekonomian.

Penulis sadar bahwa hasil ini belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kita semua.

Indralaya, Agustus 2005

LABET

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya, baik berupa penyajian materi ataupun maupun di dalam analisis penjelasannya. Hal ini karena keterbatasan yang penulis miliki dan masih perlu banyak belajar. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dengan semua pihak sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Zafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak DR. Sjamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. M. Umar Nuh selaku ketua pembimbing skripsi.
5. Bapak Drs. M. Syirod Saleh, M.Si selaku anggota pembimbing skripsi.
6. Bapak Dra. Eka Rostartina selaku anggota penguji skripsi.
7. Bapak Drs. Suhel, Msi selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dra. Saadah Yuliana selaku sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan.
9. Ibu Dra. Hj. Roswita AB selaku Dosen Pembimbing Akademik.

10. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah beserta seluruh staf dan BPS Kota Palembang, yang telah membantu penulis dalam penyediaan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ayahanda dan Ibunda saudara-saudaraku (Lam-lam dan Novi) tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, pengorbanan materiil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, kuucapkan terima kasih tak terhingga, juga untuk dan semoga aku dapat menjadi anak yang berguna dan dapat membalas semuanya.
12. Yu' Ita, dan Yuk Sumi terimakasih atas semua perbaikan nilai dan semua bantuannya dalam pelaksanaan ujian kompre waktu itu.
13. My Friend M. Anwar "AAN" Saddat, SE terimakasih untuk semua bantuan pencarian dan pengolahan data, serta pengetikan skripsi thank You ya.
14. Pak Gub Norman Sugita, SE " mak comblang " dan Hermanto Yngwic perjuangan kita masih panjang, teruslah maju, hidup Mahasiswa Ekonomi!,
15. Sahabat sejatiku Hendra Wijaya dan Keluarga di Kemang Manis terimakasih atas dorongan semangatnya semoga kita terus tegar menghadapi semuanya.
16. Rudi 99 teman sejatiku di kala kompre, yudisium and wisuda terima kasih untuk nasehat dan pengalamannya. Semoga kita dapat menggapai semua impian kita.
17. "Maha Dewiku yang dulu memberi semangat", aku nggak bisa melupakanmu budi baikmu semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Kita mengerti tidak ada yang abadi di dunia ini

18. Kim dan Boy, semoga hari-hari kalian selalu ceria dan jangan lupakan aku
19. Nizal dan *Serdadu hitamnya* terima kasih atas semangat dan dorongan yang udah banyak membantu aku cepatlah skripsinyo tu..
20. Agus, Teddy, Hosca, Irvan, Bram, Indra 99 dan Csnya, Jatmiko, Dian, Adi, Bambang, dan cowok-cowok EP 2000 serta Cewek-cewek Ep 2000 lainnya, Yuli 04, Ajie dan Aang 03 dan teman-teman semua angkatan EP dan anak-anak Ekonomi lainnya terimakasih atas semua persahabatan kita aku bangga telah menjadi bagian dari kalian.
21. Semua kerabat dan keluarga dari papa dan mama kuingin buktikan bahwa aku bukan yang terbaik tetapi satu diantaranya.
22. Feri, Heri Ayoung, Thamrin, dan seluruh anak-anak bukit thanks atas semuanya. Kapan main billiard lagi ?
23. Agus dan Me Hua, Terima kasih Atas semuanya.

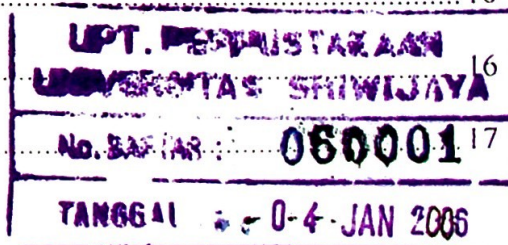
Serta teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas segalanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Persetujuan Skripsi.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstraksi.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Landasan Teori.....	11
1.6. Hipotesis.....	14
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.7.2. Sumber Data.....	17



1.7.3. Teknik Analisis	17
1.7.4. Batasan Variabel	21

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.....	23
2.1.1. Pajak Daerah	24
2.1.2. Retribusi Daerah	25
2.1.3. Pembagian Laba Badan Usaha Milik Negara.....	27
2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	28
2.2. Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang.....	30
2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang	36
2.4. Laju Inflasi sektoral.....	40
2.5. Pendapatan Per Kapita Kota Palembang.....	43

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Analisis Data	45
3.1.1. Penerimaan Daerah Yang dominan Yang Mempengaruhi PAD	45
3.1.2. Potensi Penerimaan Daerah Unggulan Kota Palembang	47
3.2. Peranan PAD Terhadap Perkembangan Ekonomi Palembang	54
3.2.1. Hasil Estimasi.....	54
3.2.2. Pengujian Statistik	55
3.2.3. Analisis Ekonomi PAD Terhadap Perkembangan Perekonomian Kota Palembang	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 61

4.2. Saran..... 61

Daftar Pustaka 63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	7
Tabel 2.1. Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang.....	25
Tabel 2.2. Realisasi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang.....	26
Tabel 2.3. Pos lain-lain Menerut Jenisnya di Kota Palembang (Rp).....	28
Tabel 2.4. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (dalam rupiah).....	29
Tabel 2.5. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku	31
Tabel 2.6. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan	33
Tabel 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang.....	37
Tabel 2.8. Laju Inflasi Sektoral Kota Palembang	42
Tabel 2.9. Perkembangan Pendapatan Per Kapita	43
Tabel 3.1 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap PAD Kota Palembang	46
Tabel 3.2. Hasil Location Quotient Penerimaan PAD Kota Palembang	48
Tabel 3.3. Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah	49
Tabel 3.4. Kontribusi Jenis Retribusi Terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah Di Kota Palembang.....	50
Tabel 3.5. Hasil Estimasi	56
Tabel 3.6. Analisis F Tabel	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.2. Uji t.....	52
Gambar 3.3. Uji F.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Variabel-Variabel PDRB (Harga Konstan 1993) dengan PAD
- Lampiran 2. Hasil Regresi
- Lampiran 3. Perkembangan PAD Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan Perekonomian di Kota Palembang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat menerangkan Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan Perekonomian di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, literatur-literatur dan buku-buku. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier.

Hasil estimasi menunjukkan R^2 sebesar 0,802 berarti 80,2% kemampuan dari besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat menjelaskan perubahan perekonomian di Kota Palembang. Sementara itu hasil uji statistik (uji-t) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan nasional di suatu negara khususnya di negara berkembang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Ini karena yang paling terasa adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tujuan itu maka pemerintah pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Di samping itu kesuksesan pembangunan nasional juga tidak terlepas dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah juga menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini dikemukakan oleh Adolf Wagner (1835-1917) dalam teori Hukum Semakin Meningkatnya Pengeluaran Negara. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, berarti pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga semakin meningkat. Oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan sumber penerimaan guna mengimbangi pengeluarannya yang semakin meningkat.

Selain itu pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia serta memperkecil jurang perbedaan antara pendapatan yang rendah dan pendapatan yang tinggi. Dalam melaksanakan tujuan itu maka pemerintah pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Di samping itu kesuksesan pembangunan nasional juga tidak terlepas dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan daerah, diperlukan dana-dana untuk membiayai pembangunan dalam jumlah besar dan perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk menggerakkan dan pembangunan guna mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Di samping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, dan pada saat ini, Undang-Undang tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejak Dikumandangkannya otonomi daerah wacana otonomi daerah

mengemuka dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap UUD 45 yang di dalamnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien karena pada hakekatnya pemerintah daerah mengetahui kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat untuk itu pemerintah daerah seharusnya dapat menggunakan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan pendemokrasian.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam kewenangan daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daerahnya. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah yang bersangkutan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya yang adil, serta perimbangan antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah atas dasar desentralisasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya secara umum pemerintah daerah akan lebih banyak memegang urusan-urusan daerahnya masing-masing termasuk mengenai urusan sumber daya alamnya dan kekayaannya sendiri serta keuangan sendiri untuk melakukan sumber-sumber pembiayaan daerahnya sendiri, kecuali urusan politik, militer serta moneter yang masih diatur oleh pemerintah pusat.

Dalam melakukan kegiatannya pemerintah daerah memerlukan dana demi melaksanakan pembangunan daerah yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kabupaten/Kota. Untuk itulah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sesuai guna membangun suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain penerimaan yang sah;

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

Adapun secara lengkap PAD berdasarkan publikasi Dipenda terdiri atas :

Komponen-Komponen PAD (Jenis Penerimaan)

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol C
7. Pajak Parkir
8. Retribusi Pungutan Administrasi
9. Retribusi Pelelangan Ikan
10. Retribusi Rumah Potong Hewan
11. Retribusi Jasa Usaha Kehutanan
12. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
13. Retribusi Izin Perdagangan
14. Retribusi Usaha Industri
15. Retribusi Pelayanan Pasar
16. Retribusi Izin Gangguan
17. Retribusi Pembinaan Ketenagakerjaan
18. Retribusi Pembinaan dan Pengs. Norma Keselamatan Kerja
19. Retribusi Pelayanan Kesehatan
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Palembang BARI
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
22. Retribusi Mendirikan Bangunan
23. Retribusi Penggunaan Tanah
24. Retribusi Penggunaan Bangunan
25. Retribusi Pemeriksaan Alat PBK
26. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

27. Retribusi Izin Jasa Kontruksi
28. Retribusi Izin Pengujian Kualitas Bangunan
29. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
31. Retribusi Terminal
32. Retribusi Jasa Angkutan Penyeberangan
33. Retribusi Izin Trayek
34. Retribusi Pembinaan Perhubungan Udara dan Telekomunikasi
35. Retribusi Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi
36. Retribusi Persampahan dan Kebersihan
37. Retribusi Pelayanan Pemakaman
38. Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat
39. Retribusi Penyedotan Kakus
40. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
41. Retribusi Penggunaan Biaya Cetak KTP
42. Retribusi Penggunaan Biaya Cetak Akta Kelahiran
43. Retribusi Kepariwisataa
44. Bank Pembangunan Daerah
45. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
46. Jasa Giro
47. Penerimaan Bagi Deposito
48. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
49. Penerimaan Lain-lain
50. Kelebihan Pembayaran Gaji

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari potensi daerah yang bersangkutan. Semua pendapatan tersebut adalah sumber penerimaan daerah yang nantinya akan digunakan dalam

pembangunan daerah. Dengan melihat Pendapatan Asli Daerah, maka secara tidak langsung dapat melihat tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerah tersebut. Apalagi di era otonomi daerah ini, salah satu aspek pembangunan yang sangat penting adalah penyebaran tanggung jawab ke daerah-daerah dalam rangka pemerataan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah salah satunya adalah untuk memungkinkan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada semua anggota masyarakat dan pelaksanaan pembangunan demi mensejahterakan semua lapisan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, oleh karena itu perlu terus dilaksanakan secara terpadu, serasi, berkelanjutan serta diarahkan supaya pembangunan di daerah yang terus berlangsung demi tercapainya kemakmuran khususnya bagi daerah itu sendiri.

Perkembangan pembangunan daerah tercermin dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan wilayah daerah itu sendiri, oleh karena kemampuan daerah masih dalam batas-batas mengelola, memanfaatkan sumberdaya ekonomi, maka kebijakan pemerintah daerah cenderung berorientasi pada kebijakan pusat. Sekalipun demikian, peranan pemerintah daerah untuk membiayai daerah sendiri setiap pengeluarannya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan harus tetap di tingkatkan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus diupayakan karena mencerminkan keikutsertaan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

Di era otonomi daerah ini usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan oleh semua daerah otonom termasuk Kota Palembang. Dengan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka daerah memiliki wewenang untuk mengalokasikannya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaannya dan pengendaliannya. Dikelola oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Sebaliknya pembiayaan yang berasal dari pusat mengenai segala hal yang menyangkut perencanaan sampai tingkat penyelesaiannya ditentukan oleh pusat yang terkadang tidak cocok dengan daerah yang bersangkutan.

Pada tabel 1.1. di bawah ini dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang kurun waktu 1994 sampai 2003 yang relatif menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Terlebih lagi pada tahun 2000-2003.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1994	9.659.726.724,32	-
1995	11.513.821.569,69	19,19
1996	13.985.254.773,89	21,24
1997	16.598.610.577,62	18,69
1998	17.234.178.998,59	3,83
1999	18.942.766.877,39	9,91
2000	22.908.608.602,02	20,94
2001	36.959.416.529,50	61,33
2002	54.036.430.570,68	46,20
2003	67.151.817.006,00	24,27

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (1994-2003)

Melihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di atas dilihat bagaimana kenaikannya khususnya setelah era otonomi daerah ini kenaikan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 20,94 % pada tahun 2000, pada tahun 2001 mencapai 61,33 % dan pada tahun 2002 46,20% serta pada tahun 2003 sebesar 24,27 Persen .

Tentunya Pendapatan Asli Daerah ini dapat digunakan untuk kebutuhan Kota Palembang yang nantinya juga berguna untuk menumbuhkan kondisi perekonomian Kota Palembang. Secara umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan jalan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat terutama yang terkait dengan objek-objek pajak dan juga retribusi. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan kegiatan investasi yang akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktifitas daerah dengan cara begitu maka secara tidak langsung dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain PDRB dapat dijadikan indikator dalam menilai perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Palembang akan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di segala pelosok wilayah selain memanfaatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan investasi pihak swasta.

Oleh karena tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah digambarkan dengan gerak laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menganalisis sejauh mana Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Perekonomian di Kota Palembang



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut bagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perekonomian di Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan perekonomian di Kota Palembang.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian yang berjudul peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan perekonomian di Kota Palembang mempunyai beberapa manfaat antara lain untuk mengembangkan penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah pada umumnya, khususnya mengenai sektor Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5. Landasan Teori

Dalam suatu negara pemerintah memegang peranan sangat penting dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Begitu juga dengan di suatu daerah maka yang memegang peranan adalah pemerintah daerah, di samping rumah tangga dan

pengusaha. Pemerintah bertugas tidak hanya mengurangi masalah ekonomi saja, melainkan bidang politik, roda pemerintahan, hukum, keamanan, dan lain-lain.

Menurut Siagian (1984 : 32) ada beberapa alasan mengapa pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Alasan tersebut antara lain :

1. Pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk alokasi dana dan daya yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pembangunan.
2. Pemerintah dengan seluruh aparatnya mempunyai informasi yang paling lengkap tentang seluruh segi kehidupan bangsa, sedangkan informasi yang dimiliki berbagai kelompok di dalam masyarakat biasanya tidak lengkap dan bersifat parsial.
3. Adanya legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan nasional beserta prioritasnya yang barang tentu dilandasi oleh aspirasi, keinginan dan harapan yang timbul dan bersumber dari rakyat.
4. Kredibilitas pemerintah dalam hubungan dengan pihak donor merupakan persyaratan mutlak dan dalam menghadapi kenyataan bahwa negara-negara yang sedang berkembang memiliki kemampuan terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut.

Menurut Suparmoko (1980 : 43) pemerintah memiliki cara-cara untuk mendapatkan uang. Cara-cara tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pajak, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2. Retribusi, yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara dimana adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari perusahaan negara.
4. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah.
5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran perizinan.
6. Percetakan uang baru.
7. Hasil undian negara
8. Pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
9. Hadiah, Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunteer dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya menurut Kamaluddin (1987:162) Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Dengan cara menggunakan pendekatan integral yaitu : dengan memperhatikan seluruh tabungan yang tersedia baik tabungan pemerintah maupun tabungan perusahaan dan masyarakat.
2. Dengan cara menggunakan pendekatan parsial yaitu dengan menghitung pembiayaan pembangunan yang berasal dari pembangunan sumber-

sumbernya, di sini khusus dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan daerah diperlukan biaya yang pada dasarnya harus diupayakan dan digali dari sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Keuangan daerah ini juga merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah, agar daerah yang bersangkutan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan penerimaan daerah menurut Tjokroamidjoyo dan Mustapididjaya (1984 : 160-162) adalah :

1. Pendapatan pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan wewenang pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti retribusi, tarif perizinan tertentu dan sebagainya.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah.
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada daerah, yang masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya sesuai dengan kriteria kondisi daerah yang berbeda.

sumbernya di pemerintah pusat secara langsung atau penggunaannya ditentukan masyarakat) seperti impres dan banpres.

6. Bantuan pemerintah pusat yang bersifat spesifik.

yang meliputi Pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

daerah. Sumber modal itu sendiri dapat berasal dari tabungan dalam negeri, berupa tabungan masyarakat (swasta) dan tabungan pemerintah selain dari tabungan swasta, pajak merupakan salah satu metode menarik dana dari konsumsi dan menjadikannya untuk investasi yang produktif.

Secara umum kebijakan fiskal di negara berkembang termasuk Indonesia, mempunyai tujuan yang berbeda dengan politik fiskal di negara yang telah maju. Adapun tujuan kebijakan fiskal di negara maju adalah untuk menstabilkan perekonomian dan untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat agar lebih merata. Sementara itu untuk negara yang masih berkembang tujuannya menurut Irawan dan Suparmoko (1982 : 210-211) tujuan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ Mengumpulkan lewat perpajakan atau tabungan pemerintah yang diperlukan untuk memungkinkan pemerintah membantu investasi swasta dengan memberikan perangsang-perangsang yang diperlukan, agar swasta berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan produksi dan pembentukan modal”.

Kebijakan fiskal yang terpenting adalah pajak, di mana pajak merupakan sumber pendapatan untuk menunjang pengeluaran pemerintah. Di samping itu pemerintah dalam melakukan pengeluaran harus memperhatikan tujuannya.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dinyatakan ada tujuh azas dalam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Azas Moralita
2. Azas Nasionalita
3. Azas Kerakyatan
4. Azas Rasionalita
5. Azas Fungsionalita
6. Azas Perkembangan
7. Azas Keseimbangan dan Keadilan.

1.6. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitiannya ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang positif terhadap Perkembangan Perekonomian di Kota Palembang.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan terbatas pada ruang lingkup daerah Kota Palembang yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian Kota Palembang yang diindikasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.7.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimana variabel yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang variabel yang diteliti antara lain Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang, dan struktur Kota Palembang, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan subjek penelitian untuk mendukung analisis permasalahan. Data time series yang digunakan hanya dibatasi dari tahun anggaran 1994 sampai tahun 2003. Data yang diambil adalah data yang bersangkutan dengan pembahasan yang diambil oleh penulis.

1.7.3. Teknik Analisis

Dalam membahas permasalahan yang ada maka penulis dengan ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang ada menggunakan kata-kata dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat analisis "Location Quatient" Dengan formulasinya sebagai berikut.

$$LQ_i = [(V_i^r / V^r) / (V_i^n / V^n)]$$

Dimana :

LQ = Koefisien Location

i = Sektor ekonomi v = Value added

r = Kabupaten/kota n = Propinsi

Apabila koefisien LQ suatu sektor ekonomi bernilai > 1 , maka merupakan indikasi awal bahwa suatu daerah mempunyai posisi surplus pada sektor ekonomi yang diamati tersebut. Sebaliknya bila < 1 , maka hal ini merupakan indikasi awal bahwa daerah tersebut mempunyai posisi defisit yang diamati.

Model Ekonometrika

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perekonomian Kota Palembang dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang. Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan suatu fungsi regresi linier model Cobb Douglas (Supranto, 1984 : 85).

Fungsi dari faktor tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1)$$

Untuk mengetahui adanya hubungan yang mempengaruhi antar variabel, maka digunakan regresi linier sederhana dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + \mu_1$$

dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Parameter



μ = Standar error

Pengujian model ini menggunakan :

1. t-test (Uji T)

Uji ini digunakan untuk memperlihatkan keandalan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, sehingga kita dapat mengetahui validity persamaan

regresi dalam meramalkan keadaan nyata, adapun rumusnya adalah $t_n = \frac{b_i}{s_{b_i}}$

dimana :

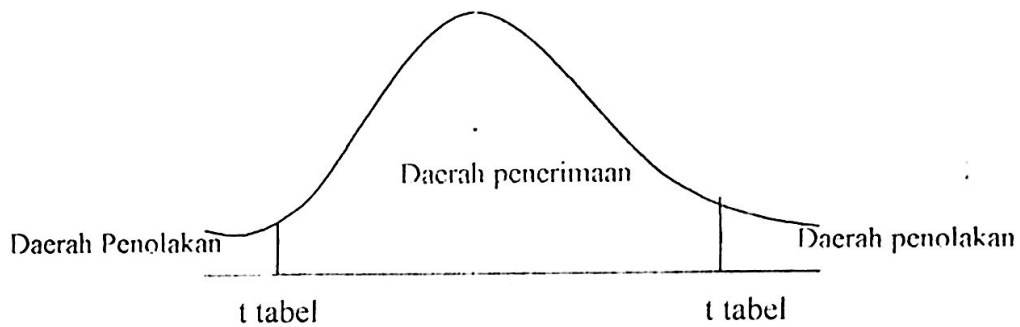
t_n = nilai t hitung

b_i = parameter

s_{b_i} = standar kesalahan parameter b_i , rumusnya adalah

$$s_{b_i} = \sqrt{\frac{se^2}{\sum x_{i2}}}$$

t hitung (t_n) ini kemudian dibandingkan dengan t tabel, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah kita dapat menerima keandalan suatu variabel ataukah menolaknya. Apa bila t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka H_0 diterima, dan apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima. Jika H_0 diterima berarti H_a ditolak dan jika H_0 ditolak maka H_a diterima, dengan derajat kepercayaan 95 % daerah penerimaan hipotesis.

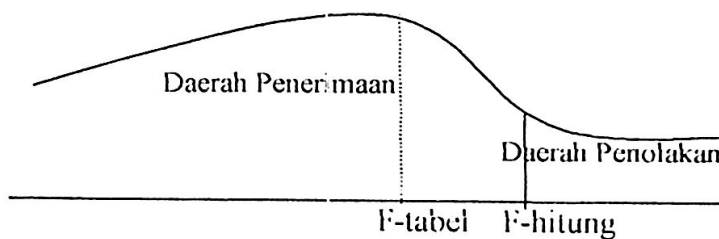


2. F-test (uji F)

Rumusnya adalah

$$F_n = \frac{\text{Rata-rata kuadrat regresi}}{\text{Rata-rata kuadrat kesalahan pengganggu}}$$

F hitung (F_n) ini kemudian dibandingkan dengan F tabel dan derajat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel berarti H_0 diterima, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka H_a diterima. Jika H_0 diterima berarti H_a ditolak, jika H_0 ditolak berarti H_a diterima.



I.7.4. Batasan-Batasan Variabel

Untuk memudahkan dalam menganalisis skripsi, maka penulis memiliki batasan-batasan variabel agar pembahasan tidak melebihi dari penulisan ini.

Batasan-batasan variabel tersebut yaitu :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pemikiran sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pemikiran sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- d. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, daerah, bagian laba BUMD penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.
- e. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi tertentu dalam kurun waktu satu tahun.

- f. Harga berlaku nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga tahun yang bersangkutan yang memasukan unsur kenaikan harga atau inflasi.
- g. Harga konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga pada tahun dasar.

Daftar Pustaka

- P3EM FE Unsri kerja sama dengan Bapedda “Studi Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”, 2002
- Agus SN, Suwondo, Gunadi *Pajak dan Retribusi Daerah*, Modul UT, Karunika, Jakarta, 1986.
- Arief, Sritua.. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 1993
- Bintoro Tjokroamidjoyo dan Mustapadidjaya, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- BPS, Palembang Dalam Angka 1994-2003
- BPS, PDRB Kota Palembang 1994-2003
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta, UI Press, 1988.
- Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 1993-2002
- Gudjarati, Damodar *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan : Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Irawan, Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1982.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2001, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001.
- M. Suparmoko, *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1980.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10*, Gramedia, Jakarta, 2003

Samuelson, Paul A. *Mikroekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1996

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sondang, Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, PT. Gunung agung, Jakarta, 1984.

Supranto, J, *Ekonometrika I*, LPFE –UI, Jakarta, 1984.

Supriyono, Bambang, *Hubungan pusat dan daerah*, artikel, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 2004.

Suseno WT, *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi* . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.